



PNS Was-was Hadapi Penegak Hukum

■ Pemkot Luncurkan SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Kenapa mereka takut atau was-was, mereka sering merasa sendirian ketika menghadapi penegak hukum, SOP ini nantinya membuat perlindungan hukum sehingga PNS tak perlu takut ketika dimintai keterangan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan produk berupa perlindungan hukum bagi pengadaan barang dan jasa. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar PNS pemegang proyek memiliki kode etik ketika menghadapi penegak hukum.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Yogyakarta Sukadarisman mengatakan, selama ini banyak PNS yang ragu, takut, dan was-was, ketika menghadapi penegak hukum sebagai pertanggungjawaban proses proyek. Padahal menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan bila memang prosesnya sesuai prosedur.

"Tapi memang banyak yang takut dan was-was ketika semisal menjadi saksi dalam proses dengan penegak hukum, karena itu kita meluncurkan panduan bila menghadapi persoalan dengan penegak hukum," ujar Sukadarisman pada Rabu (26/7).

Produk panduan ini berupa Standard Operating Procedure (SOP) yang akan digunakan PNS ketika berhadapan dengan penegak. Ia menegaskan, SOP ini bukan untuk melindungi atau PNS kebal dari hukum, namun menjadi kode etik apa yang harus dilakukan ketika mendapat panggilan semisal terkait temuan BPK.

"Kenapa mereka takut atau was-was,"

ke halaman 14

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Daftar

PNS Was-was Hadapi Penegak

• Sambungan Hal 13

mereka sering merasa sendirian ketika menghadapi penegak hukum, SOP ini nantinya membuat perlindungan hukum sehingga PNS tak perlu takut ketika dimintai keterangan," jelasnya.

Sasaran

la memaparkan, SOP ini nantinya menyoasar bagi kepala pengguna anggaran, pengguna kuasa anggaran, pejabat pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengap-

resiasi langkah peluncuran perlindungan hukum ini. Menurutinya, ini merupakan langkah untuk bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Heroe menambahkan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Yogyakarta cukup sering mendapat saran maupun keluhan dari masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa. Tidak sedikit pula permasalahan muncul, semisal persoalan sengketa.

"Pengembangan kode etik berupa SOP ini membuat kita semua (PNS) bisa nyaman dalam bekerja. Kita tidak ragu dan takut, sehingga menghasilkan kiner-

ja yang lebih baik," ungkap Heroe.

Langkah ini juga merupakan respon pemerintah Kota Yogyakarta terhadap berbagai keluhan yang dialami pada ULP. Kedepannya, pelayanan pengadaan barang dan jasa bisa ditingkatkan oleh PNS dengan SOP yang sudah ditetapkan sehingga menghindari kesalahan yang mungkin ditemui kejaksaan maupun BPK.

Direktur Pelatihan Kompetensi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI Tatang Wiraatmadja turut mengapresiasi langkah pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian dari reformasi peng-

adaan. Pasalnya, 40 persen APBN dan APBD dipakai untuk program pengadaan barang dan jasa, sehingga berisiko tinggi.

"Yakinlah apabila menjalankan ini dengan baik dan bersih, pasti selamat. Tapi menuju ke sana harus ada jaminan, ya perlindungan hukum ini, tapi bukan berarti yang salah dilindungi hukum," jelas Tatang.

Ia menjelaskan, yang dikembangkan adalah kode etik berupa SOP yang berintegritas. Tujuannya agar setiap langkah proses pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik, sehingga memperkecil adanya penyimpangan. (gil)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005